

Perjuangan Pasraman Formal agar tetap Eksis sebagai Lembaga Pendidikan di Bali

I Made Bagus Andi Purnomo*

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i01.p13>

Abstract

The Struggle of Formal Pasraman to Exist as an Educational Institution in Bali

The existence of formal pasraman (a specific educational institution based on Hinduism) was firstly welcomed warmly by Balinese people. Nevertheless, this existence is being destabilized because the existing formal pasraman experiences several limitations on fulfillment of educational standard requirements. This research observes the challenges of formal pasraman in Bali to subsist as a formal educational institution. Applying qualitative approach, this research collected data through observation, interview, and document study techniques. Data were analyzed eclectically using three theories, namely hegemony theory, structural functionalism, and innovation diffusion. This research discovered diverse obstructions faced by formal pasraman with the aim of continuing to subsist as a formal educational institution, mainly having been the struggle of formal pasraman to be registered in Basic Education Data (Dapodik) and to be broadly acknowledged by the people of Bali.

Keywords: formal pasraman; Hinduism-based educational institutions; educational standard requirements

1. Pendahuluan

Eksistensi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu yang telah diperbarui dengan PMA 10 Tahun 2020 memberikan harapan besar terhadap umat Hindu di Indonesia dan Bali khususnya mengenai pola pendidikan keagamaan yang bukan hanya menekankan pada pendidikan umum semata, tetapi juga pendidikan holistik berbasis moral, etika dan religiusitas melalui pasraman. Pasraman formal menurut PMA 56/2014 adalah pasraman yang terstruktur dan berjenjang mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi.

* Penulis Koresponden: bagusandipurnomo@gmail.com

Artikel Diajukan: 5 Februari 2023; Diterima: 6 April 2023

Pada tataran filosofis bahwa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki tujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama dan menyerasikan penguasaan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Muchith, 2015). Sementara, pendidikan keagamaan juga bertujuan pula membentuk peserta didik agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Darlis, 2018, p. 24).

Terkait aspek historis, pasraman formal yang saat ini muncul dan berkembang terinspirasi dari sistem pendidikan yang lebih holistik mengkombinasikan pola keagamaan dengan pendidikan modern yang memiliki kesamaan dengan pola pendidikan keagamaan Islam yakni pesantren atau pendidikan diniyah. Pesantren dalam sejarahnya merupakan produk asli Nusantara yang berasal dari warisan pra-islam model *pasraman/ashram* atau *katyagan* (Salahuddin, et al., 2019). Di Bali, pasraman atau *pedukuhan* merupakan warisan pola pendidikan masa lalu yang sudah sangat mengakar hingga sampai saat ini (Paramartha & Yasa, 2017; Winanti, 2021).

Secara regulatif, keberadaan pasraman formal menjadi momentum penting dalam mewujudkan peserta didik yang ahli dalam ilmu agama sebagai bagian dari fungsi besar pendidikan keagamaan itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan isi dari PMA 56/2014 bahwa pasraman formal bertujuan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa/*brahmacari* untuk menjadi ahli ilmu agama dan memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Weda.

Eksistensi pasraman formal di Bali cukup mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan berdirinya puluhan satuan pasraman formal dari semua jenjang, mulai dari Pratama Widya Pasraman (PWP), Adi Widya Pasraman (AWP), Madyama Widya Pasraman (MWP) sampai Utama Widya Pasraman (UWP) (Purnomo, 2022). Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali mencatat jumlah total pasraman formal di Bali pada 2023 adalah 42 lembaga yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali, terkecuali Kota Denpasar yang belum satu pun berdiri lembaga pasraman formal. Jumlah pasraman formal jenjang PWP sebanyak 32 lembaga, jenjang AWP sebanyak lima lembaga, jenjang MWP sebanyak dua lembaga dan jenjang UWP sebanyak dua lembaga.

Masyarakat melihat adanya urgensi terhadap keberadaan pasraman formal sehingga terdorong mendirikan lembaga-lembaga pasraman berbagai jenjang (Suryawan & Utama, 2021; Sutriyanti, 2020). Mereka berharap keberadaan pasraman sebagai lembaga pendidikan keagamaan mampu

menyentuh ranah teoritik-praktis pada aspek mentalitas dan karakter siswa di tengah merosotnya moral dan etika generasi muda saat ini. Lembaga pendidikan keagamaan diyakini mampu menjadi bagian integral dalam pendidikan karakter karena bersifat indigenous, tradisional, dan skolastik yang sangat menekankan adanya hubungan yang kuat antara guru dan siswa, serta penekanan moralitas yang lebih holistik dan menyeluruh (Supriatna, 2021; Muchith, 2015). Konsepsi tersebut semakin dikuatkan dengan pemahaman bahwa pasraman bukan hanya menekankan pada kemampuan kognisi dan intelektualitas peserta didik, tetapi menyentuh lebih dalam ranah humanistik melalui pembelajaran dengan pendekatan keagamaan Hindu (Sutarya & Yasa, 2017; Segara, 2016; Yudana, 2021).

Secara faktual dan kontekstual, eksistensi lembaga-lembaga pasraman formal kini tengah menghadapi tantangan dan problematika yang cukup pelik utamanya terkait delapan standar pendidikan. Pasraman formal yang berada di bawah yayasan menghadapi berbagai masalah dan kesulitan cukup rumit pada berbagai aspek, mulai dari tenaga pendidikan dan kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, manajemen, keuangan, pembiayaan, dan bidang pengelolaan data pendidikan (dapodik) serta berbagai permasalahan lainnya. Belum lagi minimnya dukungan berbagai *stakeholder* mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah dan ketiadaan regulasi sehingga pemerintah daerah tidak dapat memberikan dukungan materiil terhadap eksistensi pasraman formal.

Pasraman formal juga mengalami kendala permasalahan sosiologis karena harus mengalami realitas menghadapi masyarakat yang berada dalam “hegemoni” sekolah modern yang lebih dulu eksis dan berkembang dalam kultur sosial masyarakat Bali. Suda (2017) berpendapat bahwa hegemoni pendidikan modern telah menciptakan sebuah penerimaan publik berupa ide, gagasan yang disebarluaskan melalui berbagai institusi termasuk pendidikan. Terdapat sebuah stigma bahwa terjadi kastanisasi pendidikan dimana pendidikan keagamaan dicap kasta lebih rendah dibandingkan dengan sekolah modern. Hal praktis di lapangan membuktikan dari adanya paradoks antara masyarakat yang mendukung keberadaan pasraman formal dan kalangan yang abai, acuh dan pesimis lembaga ini akan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan modern.

Segara (2020) memaparkan permasalahan-permasalahan krusial terkait eksistensi pasraman formal di Bali berupa masalah struktural seperti koordinasi yang masih lemah dengan pihak terkait. Seyogianya, dalam setiap penyusunan struktur kurikulum, bahan ajar dan kelengkapan lainnya, Ditjen Bimas Hindu melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi

(Kemendikbud Ristek), namun hal tersebut tidak maksimal dilaksanakan. Ditjen Bimas Hindu belum melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian, terutama di bidang politik, dan dukungan lainnya.

Idealnya, Provinsi Bali dapat mendirikan pasraman rintisan atau *pilot project* sehingga dapat menjadi patok banding bagi daerah lainnya untuk mendirikan pasraman formal. Masalah lainnya yakni terkait adanya paradoks pada data pokok pendidikan (dapodik) yakni tidak ada sinkronisasi data dan juga kurangnya tenaga operator akibat ketiadaan *memorandum of understanding* (MoU) antara Ditjen Bimas Hindu dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Urgensi MoU karena tidak mudah menambah operator, Ditjen Bimas Hindu dapat memberikan tugas tambahan pada operator Simpatika yang terdapat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kankemenag kabupaten/kota untuk mengoperasikan Dapodik Keagamaan Hindu.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan perjuangan pasraman formal agar eksis sebagai lembaga pendidikan, sehingga masyarakat tergerak memberikan dukungan bagi keberlangsungan pasraman formal saat sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman pada penelitian yang mengambil lokus pasraman formal melalui pendekatan sosiologi pendidikan agama Hindu.

2. Kajian Pustaka

Pasraman formal mendapatkan perhatian dari kalangan masyarakat akademis sehingga menarik minat peneliti melakukan kajian/penelitian terkait keberadaannya di Pulau Dewata. Adapun beberapa penelitian yang digunakan sebagai kajian pustaka yakni; Pertama, penelitian Sutriyanti (2020) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Bali terhadap Pasraman Formal” mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap keberadaan pasraman yang kurang optimal dan kaitan persepsi masyarakat terhadap konsep *sraddha* (keyakinan) dan *bhakti* (kasih sayang). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah objek material yakni pasraman formal di Bali. Sementara, perbedaan pada kajian yakni Sutriyanti fokus mendeskripsikan mengenai persepsi masyarakat terhadap keberadaan pasraman formal, sedangkan, penelitian ini mengkaji aspek fenomenologis keberadaan pasraman formal dan deskripsi perjuangan agar tetap eksis sebagai lembaga pendidikan formal

Kedua, Gunawan, et al. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Pasraman Gurukula Bangli sebagai Institusi Pendidikan

Keagamaan Hindu” memaparkan mengenai keberadaan pasraman gurukula yang mengkombinasikan antara pola pendidikan asrama/pasraman dengan pendidikan modern. Adapun persamaan penelitian yakni sama-sama mengkaji pasraman formal. Hanya saja, secara konseptual, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian yang dilakukan Gunawan dkk yakni penelitian terkait lebih banyak mendeskripsikan satu lembaga yakni Yayasan Gurukula Bangli yang mengelola pasraman formal dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan, penelitian ini lebih mengkaji secara sosiologis dalam pendekatan pendidikan agama Hindu terkait aspek perjuangan beberapa pasraman formal yang tersebar di beberapa kabupaten di Bali agar tetap eksis sebagai lembaga pendidikan formal.

Ketiga, Ningrat & Rajendra (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pendidikan Pasraman dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Karakter Generasi Muda di Era Globalisasi” mendeskripsikan secara umum mengenai pasraman sebagai pembentuk karakter generasi muda di Pulau Dewata. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama mengkaji pasraman. Hanya saja, Ningrat dan Rajendra membahas pasraman secara umum, baik formal dan non-formal, sementara, penelitian ini fokus pada objek kajian pasraman sebagai pasraman formal. Pada tataran teoretik, Ningrat dan Rajendra juga lebih banyak membahas teks kepustakaan mengenai pasraman, sedangkan penelitian ini lebih berbasis penelitian lapangan mengkaji fenomena keberadaan pasraman formal di Bali agar tetap eksis sebagai lembaga pendidikan.

Keempat, Suda (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pasraman Sebagai Energi Pendidikan Agama dan Seni Hindu dalam Dominasi dan Hegemoni Pendidikan Modern” mendeskripsikan bahwa pasraman sebagai sistem pendidikan Hindu dalam prakteknya belum bisa berkembang secara maksimal, sebab dalam realitasnya, keberadaan lembaga pendidikan yang bernuansa Hindu ini berada di bawah dominasi dan hegemoni sistem pendidikan modern. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji bagaimana dominasi dan pengaruh lembaga-lembaga pendidikan modern terhadap keberadaan pasraman formal. Hanya saja, Suda lebih mengkaji dalam pandangan kultur budaya bersifat naratif berbasis pada kajian kepustakaan. Sementara peneliti mengkaji topik penelitian dari pandangan sosiologi pendidikan agama Hindu dan lebih pada pola pemertahanan pasraman formal agar tetap eksis sebagai lembaga pendidikan. Mengenai lokus penelitian juga peneliti lebih memfokuskan pada pasraman formal di Bali saja, sedangkan, Suda mengkaji pasraman secara umum, baik formal dan non-formal.

3. Metode dan Teori

3.1 Metode

Penelitian ini adalah jenis kualitatif menggunakan pendekatan kajian pendidikan agama Hindu, utamanya sosiologi pendidikan agama Hindu. Data penelitian berupa observasi dan wawancara menyasar beberapa pasraman formal di Provinsi Bali dan *stakeholders* dari pemerintah daerah. Wawancara yang dilakukan terhadap lima orang pengelola pasraman formal di Kabupaten Buleleng yakni Ketut Trika Adi Ana selaku Ketua Yayasan Adi Prima dan Ade Gorbi Irawan, S.Pd., M.Pd selaku Pengelola dan Kepala UWP Vidya Wisata Kubutambahan. Wawancara juga dilakukan kepada Luh Pancawati dan Komang Widi Ariani selaku kepala dan operator pada PWP Dama Kumara Desa Patemon, dan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Wawancara yang dilakukan dengan pengelola pasraman formal di Buleleng bertujuan menggali lebih dalam terkait pengelolaan delapan standar pendidikan dan kendala-kendala yang dihadapi pada pasraman formal. Wawancara juga dilakukan terhadap pengelola pasraman formal di Kabupaten Gianyar dan Karangasem atas nama Made Madriana, S.Pd., M.Pd.H dan Made Asnawa Dikta bertujuan menggali data mengenai dinamika pengelolaan lembaga pasraman formal jenjang menengah dan teknis sosialisasi pasraman formal terhadap masyarakat. Wawancara bersama Ida Bagus Surya Bharata, S.Pd., M.AP. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng guna menggali data terkait pengelolaan dapodik pasraman formal pada pemerintah daerah yang mengurus urusan pendidikan dan berbagai dinamika di dalamnya.

Sementara, teknik studi dokumen dilakukan menyasar buku, artikel jurnal, regulasi perundang-undangan dan juga catatan-catatan topik pasraman formal. Khusus mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis mendalam (*verstehen*) melalui pendekatan model Spradley yang dimulai dari analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema kultural.

3.2 Teori

Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori struktural fungsional, teori hegemoni dan teori difusi inovasi. Teori fungsional struktural menurut Talcott Parsons (Ritzer, 2016) berkaitan dengan pemahaman bahwa masyarakat terdiri dari struktur-struktur yang berkaitan sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing struktur tersebut. Kaitan dengan penelitian ini, seberapa daya kemampuan pasraman formal mampu eksis sebagai bagian dari struktur sosial dan mampu memerankan fungsinya dalam kultur masyarakat itu sendiri.

Terkait dengan teori hegemoni Antonio Gramsci, penelitian ini berupaya mengkaji dampak hegemoni sekolah umum (modern) terhadap eksistensi pasraman formal sebagai lembaga pendidikan. Sementara, teori difusi inovasi milik Everett M. Rogers digunakan untuk mengkaji bagaimana pasraman formal sebagai sebuah inovasi mampu berdifusi dalam kultur sosial masyarakat, diterima atau sebaliknya ditolak (Daryanto, 2016).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Catatan Perjuangan agar Eksis Setara dengan Pendidikan Umum

Pasraman formal di Bali sebagai lembaga pendidikan sedang berjuang agar statusnya diakui sebagai lembaga pendidikan umum. Perjuangan tersebut dimulai sejak 2014 lalu dimana PMA 56/2014 mulai digulirkan. Pasraman formal yang pertama melakukan perjuangan tersebut adalah Pratama Widya Pasraman Dama Kumara di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Adi dan Madyama Widya Pasraman Rsi Markandeya di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dan Utama Widya Pasraman (UWP) Vidya Wisata di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Pasraman-pasraman tersebut seakan memasuki “rimba hutan” ketika awal-awal berdiri sebagai lembaga pendidikan berlabelkan pendidikan keagamaan Hindu. Pasraman formal juga seakan “menerobos” minimnya struktur dan regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap eksistensi lembaga pendidikan keagamaan dan menerobos kultur sosial masyarakat di Bali yang sangat awam dengan sekolah berpola pendidikan keagamaan, berbeda dengan agama lain seperti Islam di Pulau Dewata yang memiliki ratusan lembaga pendidikan keagamaan.



Foto 1. Siswa UWP Vidya Wisata Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng saat berfoto bersama di depan Gedung UWP yang kondisinya cukup representatif (Foto: Dokumentasi UWP Widya Wisata Kubutambahan).

Perjuangan agar pasraman formal setara dengan sekolah umum diakui sendiri oleh Ketua Yayasan Adi Prima, Ketut Trika Adi Ana yang mengelola UWP Vidya Wisata di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Pasraman ini memiliki gedung yang cukup representatif (Foto 1). Pada awalnya, masyarakat di daerah tersebut menaruh kecurigaan yang besar terhadap status lembaga pendidikan yang dikelolanya. Bahkan, sekolah keagamaan Hindu yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pertama di Bali itu pernah didemo oleh masyarakat yang mempertanyakan keabsahan izin dari UWP.

Dulu kami pernah didemo oleh masyarakat lokal di wilayah Dusun Kubuanyar wilayah Desa Kubutambahan karena pasraman kami diklaim tidak berizin. Ketika itu memang Surat Keputusan (SK) pendirian dari Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Hindu belum turun. Kami meyakinkan agar warga masyarakat bersabar dan menunggu izin. Beberapa bulan setelahnya izin kami baru turun (Trika Adi Ana, wawancara 2 Januari 2023).

Permasalahan yang sama juga dihadapi oleh pasraman formal di wilayah Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar yakni PWP, AWP dan MWP Rsi Markandeya Desa Taro. Pada awal pendirian, masyarakat mulai meragukan keberadaan pasraman formal yang berjenjang dari PWP setara Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) hingga MWP yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Yayasan Lembu Putih yang mengelola tiga pasraman formal di Taro sempat kewalahan di awal untuk meyakinkan masyarakat mengenai lembaga pendidikan keagamaan Hindu. Sejak 2016 hingga sekarang (7 tahun, 2023) bahwa kepercayaan masyarakat masih tergolong lemah terhadap keberadaan lembaga kami (Made Madriana, wawancara 7 Januari 2023).

Padahal, lembaga berbasis keagamaan Hindu pertama di Kabupaten Gianyar ini sempat dikunjungi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pada 2020 lalu sebagai upaya dukungan dan pengakuan atas program pendidikan keagamaan Hindu. Hal ini menandakan bahwa pemerintah pusat mulai peduli atas keberadaan pasraman formal sebagai lembaga pendidikan (Foto 2).



Foto 2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat memberikan bantuan tas sekolah kepada siswa Madyama Pasraman formal Rsi Markandeya Taro (Foto: MWP Rsi Markandeya Taro).

Perjuangan pasraman formal agar diakui setara dengan sekolah umum juga dialami oleh lembaga pendidikan pasraman formal yang baru berdiri periode 2022-2023 yakni PWP Saraswati di Desa Tanguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Pasraman yang merupakan inisiasi dari Yayasan Perguruan Saraswati masih terkendala lemahnya kepercayaan masyarakat akan lembaga pendidikan berlabelkan Hindu.

Memang sekolah kami belum diakui setara dengan sekolah PAUD pada umumnya. Buktinya setiap ada kegiatan rapat PAUD di Kecamatan Seririt. Lembaga kami tidak pernah dilibatkan dan dibilang bahwa beda antara sekolah di Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Elly Wahyuni, wawancara 7 Januari 2023).

Beberapa permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa perjuangan pasraman formal sebagai lembaga swasta di bawah yayasan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Seakan terjadi diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta (Mahendra, et al. 2020). Selain itu, fakta fenomenologis di atas memberikan gambaran bahwa eksistensi pasraman formal belumlah didukung pada tataran struktur dan kultur. Terkait tataran struktur, pasraman formal masih belum sepenuhnya mampu menjadi bagian dari struktur hierarki lembaga pendidikan.

Bukti nyatanya memang banyak pemerintah daerah yang menafikan bahkan tidak peduli dengan keberadaan lembaga-lembaga ini. Pada tataran kultur, masyarakat bahkan dengan nyata menolak keberadaan pasraman formal di beberapa daerah, sebagian besar mungkin pasif dan acuh. Hal tersebut menurut Suda (2017) disebabkan karena kuatnya hegemoni lembaga pendidikan modern yang sudah mengakar. Hal lain menurut Sutriyanti, (2020) bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan pasraman formal masih tergolong rendah sehingga memerlukan waktu sosialisasi yang lebih intensif oleh para pihak.

Pasraman formal pada perkembangannya juga diklaim memiliki sejumlah permasalahan dalam delapan standar pendidikan dan terlalu besarnya porsi pada lemahnya kepercayaan masyarakat (Segara, 2020). Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Suryanto (2023) bahwa hasil temuan penelitiannya pada pasraman formal seluruh Indonesia menitikberatkan pada kultur sosial Hindu yang tidak terbiasanya dengan model pendidikan keagamaan semacam pesantren yang memiliki ciri khas tokoh keumatan (kyai) yang mampu menarik minat masyarakat. Hal ini yang tidak dimiliki pasraman formal yang sebenarnya lebih *apple to apple* dengan pesantren atau pendidikan diniyah. Faktor pendidikan dan pelajaran agama yang masih dianggap tidak terlalu penting dan “pelajaran kelas dua” (Suda, 2017), juga menjadi salah satu kendala mengapa pasraman formal terhegemoni oleh keberadaan sekolah modern, selain karena kurikulum pasraman formal yang terlalu berat.

Kondisi pasraman formal tersebut telah mengafirmasi teori fungsional struktural milik Talcott Parsons (Ritzer, 2014) bahwa ada empat imperatif fungsional yang perlu bagi (karakteristik dari) semua *system-adaptation*, *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), dan *latention* (latensi) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional itu dikenal sebagai skema AGIL. Agar dapat lestari, suatu sistem harus melaksanakan keempat fungsi tersebut (Sztompka, 2017).

Terkait ranah struktur, konteks fungsionalisme struktural juga menekankan adanya konsensus dalam struktur tersebut (Ritzer & Stepnisky, 2019). Melalui konsensus diyakini akan tercapai kesepakatan dalam interaksi sosial guna menjalankan fungsi masing-masing sub-kultur sosial. Dalam hal ini, eksistensi para pemangku kebijakan pada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi belum mampu mewujudkan konsensus terkait keberadaan pasraman formal. Pada tataran kultur, masyarakat pun belum memiliki pemahaman untuk mewujudkan konsensus mengenai pasraman formal sebagai institusi pendidikan setara dengan sekolah umum.

4.2 Catatan Perjuangan pada Data Pokok Pendidikan

Secara teknis data pokok pendidikan pasraman formal berstatus “menumpang” pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud Ristek. Fakta ini berbeda dengan sekolah umum bercirikan agama (madrasah) dan sekolah keagamaan (pesantren) pada agama Islam yang telah memiliki sistem tersendiri (emis dan e-pesantren). Oleh karena itu, tataran kontekstual pasraman formal seakan-akan terbawa dalam arus hegemoni eksistensi sekolah modern yang saat ini telah eksis dengan berbagai prestasi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki.

Permasalahan ini dipaparkan detail oleh Kepala UWP Vidya Wisata Kubutambahan, Ade Gorbi Irawan, S.Pd., M. Pd. terkait perjuangan UWP sejak 2017 untuk memperoleh kepastian terkait basis data pokok pendidikan.

Sejak 2017 kami sudah berkeliling ke kantor-kantor pemerintah menanyakan terkait status dapodik dari UWP. Pertama kami datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Oleh para pimpinan disana disampaikan bahwa tidak tahu mengenai dapodik dan disuruh berkoordinasi dengan dinas pendidikan di daerah. Kami datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng malah dilempar lagi disuruh menanyakan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Alasannya ketika itu bahwa SMA di bawah naungan provinsi. Kami datang ke Disdikpora Provinsi malah (mereka) tidak tahu juga dan menyuruh kami berkoordinasi dengan Ditjen Bimas Hindu. Barulah pada 2019, setelah dua tahun berjuang, baru ada kejelasan dapodik dari Ditjen Bimas Hindu di mana Ditjen baru memiliki operator pusat yang ditunjuk pihak Kemendikbud Ristek (wawancara 7 Januari 2023).

Sejak 2019 sampai dengan 2023 ternyata permasalahan belum selesai sepenuhnya, salah satu masalah krusial adalah beberapa pasraman formal saat ini masih terdeteksi sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menyebabkan guru dan tenaga pendidik pada pasraman formal tidak dapat diakui sebagai guru resmi atau guru yang sah mengajar pada lembaga formal. Permasalahan terus berlarut-larut hingga kini dan belum ada solusi jelas dari pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Hindu. Permasalahan krusial ini sempat dikeluhkan beberapa operator dan pengelola pasraman formal di Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pasraman formal (FKWP) Kabupaten Buleleng saat melakukan audiensi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng yang diterima Sekretaris Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Surya Bharata, S.Pd., M.AP. (Foto 3).

Salah satu masalah muncul saat pasraman formal akan mengakses dapodik terkait beberapa keperluan *update* data dan akses terkait fitur-fitur

pada dapodik. Ternyata, pasraman formal tidak mendapatkan akses penuh pada dapodik tersebut. Mengenai hal ini dikeluhkan oleh kalangan operator yang setiap saat berhubungan dengan dapodik.

...saya bingung mengapa tidak cocok antara izin kami dari Ditjen bahwa PWP Dama Kumara adalah lembaga formal, sedangkan di Dapodik malah digolongkan lembaga pendidikan non formal. Saya sudah berulang kali berkomunikasi dengan operator di kabupaten, malah disuruh koordinasi ke Ditjen Bimas Hindu. Setelah kami koordinasi kesana malah tidak ada respon (Made Putri operator Dapodik PWP Dama Kumara, wawancara 7 Januari 2023).



Foto 3. Para pengurus pasraman formal di Kabupaten Buleleng saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng (Foto: I Made Bagus Andi Purnomo).

Terkait permasalahan tersebut, Sekretaris Disdikpora Buleleng cukup terkejut atas permasalahan tersebut karena memperkirakan bahwa selama ini data sekolah berbasis keagamaan Hindu terintegrasi di Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut.

Saya mengira selama ini sekolah Hindu itu Dapodiknya di Kementerian Agama seperti bagaimana pemahaman saya mengenai emis milik madrasah. Selama ini kami memang rutin berkoordinasi dengan Bidang Pendidikan Agama Islam yang mengelola madrasah dari tingkat Radhatul Adfal (RA) sampai Madrasah Tsanawiyah (Mts) (Ida Bagus Surya Bharata, S.Pd.,M.AP, wawancara 10 Januari 2023).

Sesuai dengan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa belum sepenuhnya terjadi integrasi pasraman formal pada data pokok pendidikan saking kuatnya hegemoni dari sekolah umum. Ada stigma bahwa jika suatu sekolah sudah masuk dapodik, data-datanya sudah benar dan aman semua (termasuk pasraman formal). Hal lain yang menjadi penyebab yakni, pertama, minimnya koordinasi antara Kemenag Buleleng dengan Disdikpora Buleleng sehingga masalah-masalah vital mengalami stagnasi dan keterlambatan penanganan tentang keberadaan pasraman formal.

Kedua, adanya persepsi dari Disdikpora terkait dapodik bahwa sistem data dari pasraman menjadi satu kesatuan dengan sistem data pada Kemenag (emis), ketiga, pasraman formal tidak dapat mengakses beberapa menu pada dapodik seperti akun id.belajar, aplikasi khusus dapodik karena hanya bisa pada jenjang MWP/SMP harus diakses melalui *browser*; keempat, beberapa pasraman formal yang ada di Buleleng pada data dapodik tersebut masih digolongkan pasraman nonformal, padahal, dalam izin operasional dan teknis keberadaan pasraman formal bahwa disetarakan dengan sekolah formal baik dari jenjang PAUD/TK sampai SMA/SMK.

4.3 Catatan Perjuangan untuk Dikenal oleh Masyarakat Luas

Masyarakat Hindu di Bali umumnya mengenal pasraman hanya sebatas pada lembaga pendidikan nonformal berupa pasraman kilat yang diselenggarakan oleh desa adat. Banyak khalayak di Bali belum paham betul regulasi dan status pasraman pasca hadirnya PMA 56/2014 tentang pendidikan keagamaan Hindu. Yhani (2018) berpandangan bahwa pasraman kilat lebih dulu mengakar dan dipahami masyarakat. Pasraman kilat pun dalam penelitian Sudarsana (2019) sebagai salah satu metode membangun karakter generasi muda karena terbatasnya pelajaran agama pada kurikulum keagamaan. Pasraman formal masih memerlukan waktu lebih panjang lagi untuk dikenal melalui sosialisasi intensif dan juga publikasi melalui media massa sehingga mampu berdifusi secara sosial terhadap masyarakat luas di Pulau Dewata (Purnomo & Indiani, 2022; Suryanto, 2023).

Pasraman formal kini terus berusaha dikenal oleh masyarakat melalui berbagai publikasi dan *branding* masif pada pasraman formal yang mampu beradaptasi sejalan dengan pandangan Mujib (dalam Kiriana, 2021) bahwa setiap lembaga pendidikan akan terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman, oleh karena itu untuk menghadapi sebuah perubahan diperlukan kesiapan oleh seluruh komponen pendidikan. Pasraman formal secara aplikatif harus memanfaatkan berbagai *platform* media sosial agar mampu semakin dikenal, terlebih media sosial seperti *website* tidak memerlukan biaya besar (Purnomo, 2022).

Upaya keras terus dilakukan oleh pasraman formal melalui berbagai sosialisasi di masyarakat seperti yang dilakukan oleh PWP Rare Semesta di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem. Sosialisasi dilaksanakan dengan turun langsung ke masyarakat guna menyosialisasikan keberadaan PWP pertama di desa tersebut.

Kami terus turun ke masyarakat utamanya desa adat karena sesuai Perda 4/2019 memang desa adat bisa mendirikan pasraman formal. Sejauh ini respons masyarakat cukup baik dengan menyekolahkan putra-putrinya di PWP (Made Asnawa Dikta, Kepala PWP Rare Semesta, wawancara 2 Januari 2023).

PWP di wilayah Kabupaten Buleleng juga gencar berdifusi di masyarakat dengan intensif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, utamanya pada tokoh-tokoh adat seperti yang dilakukan oleh PWP Dama Kumara di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. PWP pertama di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut berupaya menjalin komunikasi agar keberadaan lembaga semakin dikenal oleh masyarakat melalui tokoh-tokoh adatnya.

Koordinasi dan komunikasi rutin kami lakukan dalam berbagai kegiatan adat. Terlebih saya memang menjadi bagian dari desa adat di Patemon. Kami terus menjalin koordinasi sehingga hampir setiap tahun pula pasraman kami dibantu anggaran oleh desa adat (Luh Pancawati, Kepala PWP Dama Kumara, wawancara 3 Januari 2023).

Sosialisasi juga gencar dilakukan oleh UWP Astika Dharma di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem guna semakin dikenal oleh masyarakat. UWP pertama dan satu-satunya di “bumi lahar” tersebut berstrategi dengan menyematkan nama SMA pada UWP agar mudah dikenal dan berdifusi secara sosial di masyarakat. Dukungan keberadaan UWP salah satunya didukung oleh Gede Pasek Suardika, seorang politisi asal Bali. Gede Pasek rutin membagikan berbagai kegiatan pada pasraman yang ia dirikan bersama tokoh-tokoh di Bali (Foto 4).

Upaya pasraman formal untuk terus dikenal oleh masyarakat mengafirmasi bahwa pasraman formal sebagai sebuah inovasi dari regulator dalam hal ini Ditjen Bimas Hindu telah melalui proses difusi yang sesuai dalam kultur dan organisasi sosial serta ranah hirarki institusi pendidikan pada umumnya (sekolah modern). Hipotesis tersebut berpijak pada teori difusi inovasi milik Everett M. Rogers (dalam Daryanto, 2016) yang menyatakan bahwa inovasi yang terdifusi ke seluruh masyarakat dengan pola yang dapat diprediksi. Difusi inovasi dimaknai sebagai sebuah proses yang mengomunikasikan informasi

tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi demikian perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial.



Gede Pasek Suardika

25 Oct 2022 · 🌐



Senang sekali disela sela kesibukan menyempatkan diri pulang ke Bali sekadar bisa hadir merayakan HUT ke 3 SMA Hindu **Uwp Astika Dharma**. Tanpa terasa tahun ini sekolah berbasis hybrid (berasrama dan tidak) sudah bersiap menamatkan lulusan pertamanya. Dari sebuah ide awal yaitu hanya membuat panti asuhan dan pasraman s... See more



Foto 4. Postingan Gede Pasek Suardika saat ulang tahun ke-3 UWP Astika Dharma, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

Menurut Rogers bahwa ada empat tahapan difusi sebuah inovasi yakni berupa keuntungan relatif (*relative advantage*), kesesuaian (*compatibility*), kerumitan (*complexity*), dapat diuji coba (*trialability*). Pasraman formal sebagai sebuah inovasi menyosialisasikan dan mengampanyekan kelebihan pendidikan karakter sehingga memberikan keuntungan kepada para siswa yang akan bersekolah pada lembaga tersebut. Konteks kesesuaian berkaitan dengan sebuah konsep yang berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, teknis, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri.

Pasraman diyakini banyak tidak bersesuaian dengan konsep-konsep tersebut, terutama hal-hal yang dianggap penghambat agar bisa setara dengan sekolah umum (cap pasraman non formal) dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa pasraman formal terus berusaha berdifusi secara sosial di masyarakat melalui berbagai daya dan upaya baik melalui cara langsung dan melalui *branding* pada media sosial.

5. Simpulan

Catatan perjuangan pasraman formal di Bali dalam upaya tetap eksis sebagai lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: pertama, pasraman

formal masih terus berupaya agar dianggap setara dengan sekolah umum/modern. Eksistensi pasraman formal belumlah sepenuhnya didukung pada tataran struktur dan kultur. Terkait tataran struktur, pasraman formal masih belum sepenuhnya mampu menjadi bagian dari struktur hierarki lembaga pendidikan. Bukti nyatanya memang banyak struktur pemerintah daerah di Bali yang menafikan bahkan tidak peduli dengan keberadaan lembaga-lembaga ini. Pada tataran kultur, masyarakat bahkan dengan nyata menolak keberadaan pasraman formal di beberapa daerah, sebagian besar mungkin pasif dan acuh.

Kedua, catatan perjuangan pasraman formal pada data pokok pendidikan (dapodik), Pasraman formal secara teknis data pokok pendidikan berstatus “menumpang” pada dapodik milik Kemendikbud Ristek. Fakta ini berbeda dengan sekolah umum bercirikan agama (madrasah) dan sekolah keagamaan (pesantren) pada agama Islam yang telah memiliki sistem tersendiri (emis dan e-pesantren). Oleh karena itu, tataran kontekstual pasraman formal seakan-akan terbawa dalam arus hegemoni eksistensi sekolah modern yang saat ini telah eksis dengan berbagai prestasi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Keadaan tersebut juga didorong dengan kuatnya hegemoni sekolah umum pada dapodik sehingga kepedulian sinkronisasi data pasraman menjadi minim.

Ketiga, catatan perjuangan untuk dikenal masyarakat luas melalui berbagai upaya sosialisasi baik secara langsung maupun dengan berbagai *platform* media sosial. Hal ini sebagai upaya pasraman formal untuk berdifusi pada kultur masyarakat di Bali.

Keempat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat tentang perjuangan pasraman formal, sehingga masyarakat mampu memberikan dukungan bagi keberlangsungan keberadaan pasraman formal di masa mendatang. Selanjutnya, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman pada penelitian yang mengambil lokus pasraman formal melalui pendekatan sosiologi pendidikan agama Hindu.

Daftar Pustaka

- Darlis, A. (2018). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam). *Jurnal Tarbiyah*, 25 (2), 21-40. DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/tar.v25i2.320>
- Daryanto, M.R. (2016). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Dava Media.
- Gunawan, I.G.D., Suda, I.K., & Indiani, N.M. (2020). Existence of Pasraman Gurukula Bangli as A Hindu Educational Institution. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Study*. 4 (1), 28-35. DOI: <https://doi.org/10.25078/ijhsrs.v4i1.1318>

- Kiriana, I.N. (2021). Pasraman Branding (Tantangan dan Strategi). *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP*. 110-121. DOI: <https://doi.org/10.33363/sn.v0i5.124>
- Mahendra, A., Putra, I. N. D. & Pujaastawa, I. (2020). Kebijakan Pendidikan Bermotif Politik: Pengembangan Pendidikan Dasar Melalui Pembagian Laptop Gratis di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10 (1), 327-345. DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2020.v10.i01.p15>
- Muchith, M. S. (2015). Karakteristik Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 11 (2), 145-160. DOI: <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v11i2.71>
- Ningrat, I.N.A.J., Rajendra, M. (2020). Pendidikan Pasraman Sebagai Pendidikan Karakter Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Penelitian Agama*, 6 (2), 19-28. DOI: <https://doi.org/10.25078/vs.v6i2.2043>
- Paramartha, W., Yasa, W.S. (2017). Mengungkap Model Pendidikan Hindu Bali Tradisional Aguron-guron. *Mudra, Jurnal Seni Budaya*. 32 (1). 131-140. DOI: <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.92>
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) 10 Tahun 2020 Tentang Pengganti Atas PMA 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.
- Purnomo, I. M. B. A. & Indiani, N. M. (2021). Eksistensi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Penguatan Pendidikan Keagamaan Hindu Di Indonesia. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 5 (2), 181-190. DOI: <https://doi.org/10.55115/purwadita.v5i2.1809>
- Purnomo, I.M.B.A. (2022). Upaya Publikasi Pasraman formal Melalui Website www.infopasraman.com dalam membangun citra positif. *Jurnal Communicare*. 3 (2), 61-71. <https://doi.org/10.55115/communicare.v3i2.2524>
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi, Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. (2016). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2019). *Teori Sosiologi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Salahuddin, Komaruddin, A. Rahman, A.A. (2019). *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Segara, I.N.Y. 2020. *Policy Brief: Problem dan Solusi Pasca Penerapan PMA Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu*. Jakarta: Puslitbang Diklat Kemenag RI.

- Segara, I.N.Y. (2016). *Pendidikan Karakter dan Kebutuhan Pasraman Formal*. Repository IHDN Denpasar Halaman 247–258. Diterbitkan 16 Maret 2016.
- Suda, I. K. (2017). Pasraman Sebagai Energi Pendidikan Agama Dan Seni Hindu Dalam Dominasi Dan Hegemoni Pendidikan Modern. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7 (3), 364-373. <https://doi.org/10.31940/soshum.v7i3.714>
- Sudarsana, I. K. (2016). Development Model of Pasraman Kilat Learning to Improve the Spiritual Values of Hindu Youth. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(2), 217-230. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v4i2.99>
- Supriatna, U. (2021). Urgensi Manajemen Pesantren dalam Pembentukan Karakter Santri. In *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*. 2(2), 277-288.
- Suryanto. 2023. Pasraman formal: Studi Diseminasi dan Impelementasi Inovasi Kebijakan Pendidikan Keagamaan Hindu dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. Disertasi Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suryawan, I. G. & Sutama, I. W. (2020). Implikasi Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Terhadap Perkembangan Pasraman. *Widya Sandhi*, 11(2), 95-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.53977/ws.v11i2.190>
- Sutarya, I. G. & Yasa, I. K. W. (2018). *Strategi Pengembangan Pasraman Hindu sebagai Pariwisata Spiritual*. Repository IHDN Denpasar. Diterbitkan 18 Mei 2018.
- Sutriyanti, N. K. (2020). Persepsi Masyarakat Hindu Terhadap Keberadaan Pasraman Formal di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*. 10 (1), 235-260. <https://doi.org/10.24843/jkb.2020.v10.i01.p11>
- Sztompka, P. (2017). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Winanti, N. P. (2021). Pasraman Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Budaya Dan Spiritual. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5 (2), 106–114. DOI: <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i2.1277>
- Yhani, P. C. C. (2018). Pelaksanaan Pasraman Kilat dalam Pembentukan Karakter Anak di Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu*, 9 (1), 57-64.
- Yudana, I.M. (2020). Implementasi Pendidikan Tekno-Humanistik (Reinventing Pasraman for Next-Century School. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 8 (1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.23543>

Profil Penulis

I Made Bagus Andi Purnomo adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja. Ia menyelesaikan Program Doktor Pendidikan Agama Hindu Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) terkait dinamika pengembangan pasraman formal pada tahun 2023. Selain sebagai dosen, juga aktif sebagai Ketua Yayasan Mertajati Widya Mandala sekaligus pendiri Madyama Widya Pasraman Jnana Dharma Sastra di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Penulis juga aktif sebagai perumus kebijakan pendidikan dasar dan menengah di bawah Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI. Email: bagusandipurnomo@gmail.com.